

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip/Dokumen

- 1906 *Staatblad* No. 149 Tahun 1906.
- 1912 *Staatblad* No. 422 Tahun 1912.
- 1929 *Besluit de Burgemeester van Soerabaja* tanggal 10 Mei 1929 yang diperuntukkan beberapa orang di lingkungan Dermorejo untuk tempat tinggal.
- 1954 Surat Walikota Surabaya Moestadjab Soemowidigdo No. 342/Rah/'54 perihal Pendudukan Liar Permohonan Subsidi yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 25 Februari 1954.
- 1963 Surat Laporan Warga Asemjajar kepada Walikota Surabaya tanggal 28 Agustus 1963, Perihal Penjerbuan tanah makam Asemadjajar.
- 1964 Permohonan Hak Milik/Hak Pakai atas nama Wongsoredjo kepada Menteri Pertanian dan Agraria Jakarta tanggal 2 September 1964
- 1966 Surat Pemerintah Kotamadya Surabaya kepada Deputy Menteri Transmigrasi di Jakarta, Perihal: "*Masalah Orang-orang Gelandangan di Daerah Kotamadya Surabaya*" tertanggal 6 Desember 1966
- 1966 Surat Dinas Perumahan Kotamadya Surabaya kepada P.T. Deputy Menteri Transmigrasi Djakarta tahun 1966).
- 1966 Surat Panitia Landreform Kecamatan Sawahan kepada Ketua Panitia Landreform Tingkat II Kotamadya Surabaya tanggal 16 Juli 1966
- 1966 Surat BPH Kotamadya Surabaya kepada Walikota Surabaya tanggal 11 Agustus 1966 Perihal: Soal Gelandangan.
- 1968 Surat Perintah Markas Komando Operasi Gelandangan 084 – Kotamadya Surabaya No. PRIN-002/4/68 tanggal 25 April 1968.
- 1968 Surat Perintah Komando Operasi Gelandangan 084 Kotamadya Surabaya No.: PRIN-002/4/68 tanggal 25 April 1968.



- 1970 Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur / Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya No. 69/K. No. 1/Agr./Kos/1/70 tentang Ketentuan² tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerdja Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya, Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surabaya dan Dinas Perusahaan Tanah dan Rumah Kotamadya Surabaya. Tanggal 19 Djanuari 1970.
- 1970 Agreement antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur / Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur dengan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya mengenai Pelaksanaan Tugas Agraria di Daerah Kotamadya Surabaya. Tanggal 20 Djanuari 1970.
- 1970 Putusan DPRD-GR No. 09/DPRD-GR/Kep./70 tentang Pengesyaan Rencana Pendahuluan Kotamadya Surabaya” (Out Line Plan) sebagaimana tercantum dalam buku serta gambar dalam Peta yang menjadi lampiran Surat Kepurusan ini (Lampiran 1). Tanggal 23 Nopember 1970.
- 1971 Surat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat Rungkut, Nomor 2005/22 Tanggal 5 April 1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah Lainnya.
- 1971 Surat undangan Rapat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat Rungkut, Nomor 2005/24 Tanggal 5 April 1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah Lainnya.
- 1971 Surat B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala Wilayah Surabaya Timur kepada Kepala Tjamat Karangpilang, Nomor 2005/23 Tanggal 5 April 1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Karangpilang dan tanah-tanah Lainnya.
- 1971 Surat Kepala Wilayah Surabaya Timur Kotamadya Surabaya kepada Walikota Kepala Daerah Ic. B.P.H. Akomodasi Kotamadya Surabaya Nomor 722/7/WTM./71 Tanggal 12 April 1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di Daerah Ketjamatan Rungkut dan tanah-tanah Lainnya.
- 1971 Surat BPH Akomodasi Kotamadya Surabaya kepada Kepala Wilayah Surabaya Timur Nomor 2005/31 Tanggal 26 Mei 1971 tentang Bekas Tanah Partikelir di Ketjamatan Rungkut dan Tanah Lainnya.



- 1972 Surat laporan tentang *“Kegiatan Pelaksanaan Tugas Rehabilitasi Tuna Karya Propinsi Djawa Timur Semendjak 1966 s/d. 1972”* tanggal 12 Djuli 1972.
- 1972 Laporan kegiatan rehabilitasi Tuna Karya Kotamadya Surabaya 1966 s/d 1972.
- 1974 Surat Komando Penertiban Gelandangan Kota Surabaya kepada Komandan Seksi Kota Kecamatan Karangpilang Surabaya tanggal 21 Desember 1974
- 1975 Keputusan Walikota KDH Tingkat II Surabaya No. 190/WK/75 20, Juni 1975.
- 1976 Buku Tabungan Serie RM No. 16 atas nama Soebandi, Pegawai Direktorat Agraria Prop. Jatim, tanggal diberikan 7 Agustus 1976. Ditandatangani oleh Direktur JKP Kota Besar Surabaya Ir. Ibrahim Sutjahjo.
- 1977 Surat Sekretatis Kotamadya Surabaya kepada Kepala Dinas Tanah dan Rumah No. 7804A/1100 tentang Turunan Pungutan uang sewa dang anti rugi Landreform tanggal 7 September 1977.
- 1977 Surat Gubernur Propinsi Jawa Timur kepada Bupati./Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. DA/C./9754/1977 perihal Pungutan Uang Sewa dan Ganti Rugi Landreform tanggal 25 Juli 1977.
- 1978 Surat Walikota Kepala Derah Tingkat II Surabaya kepada Gubernur Kepla Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 3000/40/78 perihal Pengesahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1977. Tanggal 12 Januari 1978.
- 1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Pucang Anom. Surabaya, 24 Februari 1983.
- 1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Wonokromo dan Sekitarnya. Surabaya, 24 Februari 1983.
- 1989 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Timur No.: PIMP. 9 Tahun 1989/1990, tentang Pembentukan Panitia Khusus Penelitian Kasus Tanah di Desa Tubanan Kecamatan Tandes dan Desa Pradah Kalikendal Kecamatan

Karangpilang Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 16 Desember 1989.

- 1996 Daftar Inventarisasi Tanah yang Dikelola oleh Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 1 Januari 1996.
- 2001 Surat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 010/1991/402.5.12/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang/perihal pengamanan tanah-tanah asset Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- 2001 Surat nomor 08/Eks/XI/2001, perihal *Permohonan dukungan, rekomendasi, dan audiensi. Diturunkan kepada DPR RI, Jakarta.*
- 2001 Surat nomor 013/Eks/IX/2001 perihal Pencabutan Peraturan Daerah dan Sertifikat Hak Pakai dan penolakan permohonan HP atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- 2001 Surat nomor 011/Eks/IX/2001 perihal *Pencabutan Peraturan Daerah dan Sertifikat Hak Pengelolaan dan penolakan permohonan HPL atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.* Surat itu tertuju Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
- 2003 Surat Badan Pertanahan Nasional No. 530.35-1076 tanggal 30 Januari 2003 perihal *Langkah-langkah koordinasi pembahasan dan penelitian tanah negara di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.*
- 2005 Rekapitulasi Hasil Pendataan Fasum Pemerintah Kota Surabaya yang Sudah Diukur oleh BPN untuk Diajukan Sertifikat Hak Pengelolaannya oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002-2005, 22 Agustus 2005
- 2008 Rekapitulasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola DPBT Kota Surabaya, 18 Februari 2008
- 2008 Rekapitulasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola DPBT Kota Surabaya, per Bulan November 2008
- 2008 Pemanfaatan Lahan Pemerintah Kota Surabaya oleh Pihak Ketiga Tahun 2005 s/d 2007, tanggal 12 Februari 2008



- 2010 Tata Cara Pengurusan Ijin Pemakaian Tanah Kota Surabaya, Dinas Pengelolaan Bangunn dan Tanah Kota Surabaya, Jln. Taman Surya No. 1 Telp. (031) 534305-57- Psw 124, 136, 154, 168, 171,213.
- 2012 Pelepasan Surat Ijo 2012, Hasil Verifikasi Seluruh Surabaya.
- 2012 Lokasi Izin Pemakaian Tanah, Pembagian Batas Administratsi Kota Surabaya.
- 2011 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 84/Pdt.G/2007/PN.Sby tertanggal 08 September 2011 dalam Perkara antara Warga Pemegang Surat Ijo Kelurahan Jagir dan Ngagelrejo melawan Pemerintah Kota Surabaya/DPRD Kota Surabaya, dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat.
- 2013 “Pejuang Surat Ijo Mendesak Pemkot dan DPRD untuk Hearing” Press Release tanggal 11 Oktober 2013.
- 2013 Surat GPHSIS kepada Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Surabaya No. 029/GPHSIS/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013.

B. Surat Khabar dan Majalah

- | | |
|-----------|--|
| Bali Post | “Ribuan Pemilik Surat Hijau Demo Walikota Surabaya” dalam <i>Bali Post</i> , 24 Februari 2004. |
| Gapura | “1 April: Lahirnja Kotapradja Surabaya” dalam <i>Gapura</i> , Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 1 April 1968 (Surabaya: Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, 1968) |
| _____ | “Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Baliknama atas Tanah Persewaan Kotamadya Surabaya” dalam <i>Gapura</i> , Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 1 April 1968. |
| _____ | “1 April: Lahirnja Kotapradja Surabaya” dalam <i>Gapura</i> , Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 1 April 1968. Surabaya: Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, 1968. |



“5000 Orang Tunakarya Menggelandang di dalam Kota” dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 1 April 1968,

“Dari Redaksi: Masalah Gelandangan Masih Belum Selesai” dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 5 September 1968

“Dengan lebar djalan 20 meter, Pusat Perdagangan Kembang Djepun Harus Segera Diremadjakan” dalam *Gapura*, Madjalah Gema Kehidupan Kota No. 7 Nopember 1968

“Lembaran Sedjarah Tram Kota” dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 5 September 1968

“Master Plan, Suatu Kelengkapan yang Mutlak bagi Tiap-tiap Kota” dalam *Gapura*, Madjalah Gema Kehidupan Kota No. 8 Desember 1968

“Urbanisasi Kepadatan Penduduk di Pusat Kota, Berdjubel 500 Djiwa Perhektar” Bagian 1, dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 4, Agustus 1968.

“Menjiapkan 5 Ketjamatan Baru, Untuk Menjedot Penduduk jang Berdjubel di Pusat Kota” dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 4 Agustus 1968,

“Urbanisasi Kepadatan Penduduk di Pusat Kota, Berdjubel 500 Djiwa Perhektar” Bagian 2, dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota No. 5, September 1968

“Surabaja Tiga Wilajah” dalam *Gapura*, Madjalah Bulanan Gema Kehidupan Kota, No. 11 Maret 1969. Surabaya: Pemda Kotamadja Surabaya, 1969.

Jawa Pos

Daftar Investor yang memperoleh ijin pembebasan tanah di Surabaya Barat pada 1971 yang dikutip *Jawa Pos*, 25 Februari 1971.

“Berakhir, Kasus Tanah Tubanan, Komnas HAM Saksikan Penandatanganan “Kesepakatan 19 Mei””

dalam *Jawa Pos*, 20 Mei 1990.

Jawa Pos

“Izin pembebasan tanah Walikota Surabaya di Surabaya Barat. *Jawa Pos*, Februari 1995.

“Pelepasan Surat Ijo Berbasis Kawasan, Pilihan Rasional Hindari Spekulasi”, dalam *Jawa Pos* 12 Februari 2011

“Sebagian Lahan Surat Ijo Akan Dilepas” dalam *Jawa Pos*, 26 Februari 2012

“Surat Ijo Dijanjikan Tahun Depan” dalam *Jawa Pos*, 5 Juni 2012

“Tanah Surat Ijo Bisa Jadi Hak Milik, Dewan Usulkan dalam Raperda Barang Milik Daerah” dalam *Jawa Pos*, 11 Februari 2012.

“Kompensasi Sesuai NJOP Memberatkan, Usul Pelepasan Tanah Status Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 13 Februari 2012.

“10.000 Persil Tidak Ber-IPT, Tanah Surat Ijo Bisa Kena Sanksi” dalam *Jawa Pos*, 18 Desember 2013.

“12 Jabatan Lurah Kosong” dalam *Jawa Pos*, 5 Desember 2013.

“Arsip Amburadul Bikin Aset Melayang, Segera Bentuk Dinas Pengelola Aset” dalam *Jawa Pos*, 17 September 2013.

“Data Surat Ijo Berbeda, Selisih 14 Ribu dengan Kecamatan” dalam *Jawa Pos*, 27 Oktober 2013.

“Desak Percepat Raperda Surat Ijo, Pemkot Selesaikan Naskah Akademis” dalam *Jawa Pos*, 15 September 2013

“Dewan Desak Prioritas Pelepasan Petok D, Rencana Raperda Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 14 November 2013

“Khawatir Jadi Komoditas Politik, Raperda Surat Ijo Harus Keluar Tahun Ini” dalam *Jawa Pos*, 18 September 2013



“Kompensasi sesuai NJOP Memberatkan, Usul Pelepasan Status Tanah Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 13 Februari 2013.

“Pelepasan Tanah Surat Ijo Paling Sulit, Pembahasan 37 Raperda Tahun Depan” dalam *Jawa Pos*, 29 Desember 2013

“Warga Bisa Beli Lahan Surat Ijo, Pemkot Bakal Lego 48 Ribu Persil” dalam *Jawa Pos*, 6 September 2013

“Dua Masalah Menahun Belum Kelar” dalam *Jawa Pos*, 4 Maret 2014

“Hasil Surat Ijo untuk Beli Lahan Baru, Warga Bayar 100 Persen tapi Bisa Kredit” dalam *Jawa Pos*, 19 Juni 2014

“Juga “Tunggu Merger Tunjuk Lurah Sementara” dalam *Jawa Pos*, 5 Januari 2014

“Makelar Surat Ijo Berkeliaran, Pemkot Terima Laporan Warga” dalam *Jawa Pos*, 4 Februari 2014.

“Pelepasan Surat Ijo Tersandung YKP, Penyusunan Raperda Mengalami Kerumitan”, dalam *Jawa Pos*, 16 Januari 2014.

“Pelepasan Tanah Hanya Minta Persetujuan Dewan, Raperda Surat Ijo Digidok” dalam *Jawa Pos*, 20 Agustus 2014.

“Pemkot Laporkan YKP ke KPK” dalam *Jawa Pos*, 6 Mei 2014.

“Pemkot Tunggu Pengajuan Warga, Pelepasan 12.958 Persil Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 18 September 2014.

“Pengajuan Surat Ijo Bertahap” dalam *Jawa Pos*, 4 Mei 2014.

“Raperda Surat Ijo Masih Bermasalah, Belum ada Luas dan Nilai Lahan” dalam *Jawa Pos*, 9 Mei 2014.

“Sengketa IMB, Yekape Kalahkan Pemkot” Jawa Pos, 7 Mei 2014.

- Jawa Pos “Tunggu Merger, Tunjuk Lurah Sementara, Pelayanan Kelurahan Dijamin Tetap Normal” dalam *Jawa Pos*, 5 Januari 2014.
-
- “Urusi Aset, Kepala DPBT Diganti” dalam *Jawa Pos*, 26 Agustus 2014.
-
- “Warga Desak Harga Pelepasan Sesuai NJOP, Awas Spekulasi Tanah Bermain” dalam *Jawa Pos*, 30 Juni 2014.
-
- “600 Persil Akan Berstatus IPT” dalam *Jawa Pos*, 4 April 2014
-
- “DPRD Minta Pemkot Buka Pusat Informasi, Agar Pelepasan Lahan Tak Terganggu Makelar” dalam *Jawa Pos*, 2 Juli 2014
-
- “Ketepatan Waktu Jadi Pertaruhan, Proses Pelepasan Tanah Surat Ijo Tidak Perlu Lama” dalam *Jawa Pos*, 28 Agustus 2014.
-
- “Pelepasan Surat Ijo Dimulai Akhir Tahun, Pemkot Target 12.958 Persil” dalam *Jawa Pos*, 6 September 2014.
-
- “Pengesahan Raperda Surat Ijo Masih Alot”, dalam *Jawa Pos*, 10 Agustus 2014.
-
- “Rencana Pelepasan Tanah Surat Ijo di Surabaya, Warga Masih Berkeberatan Nilai Kompensasi” dalam *Jawa Pos*, 30 Juni 2014.
-
- “97 Rumah Dinas Nyaris Lepas” dalam *Jawa Pos* tanggal 8 Oktober 2015.
-
- “Awas, Spekulasi Mulai Berkeliaran, Mau Talangi Dana Pelepasan Tanah” dalam *Jawa Pos*, 3 Agustus 2015.
-
- “KPP Setuju, Pemkot Legawa, Revisi Perda Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 4 Januari 2015.
-
- “Pelepasan Surat Ijo tanpa Diskon, Warga Tak Mampu Bayar Pelepasan” dalam *Jawa Pos*, 18 Agustus 2015.

- Jawa Pos “Pemkot Siap “Jual” Lahan Surat Ijo, Merasa Milik Sendiri, Warga Ogah Beli” dalam *Jawa Pos*, 3 Agustus 2015.
-
- “Proyek RSUD dr Soewandhie Bisa Berlanjut, Pemkot Menang Gugatan atas Warga Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 27 Juni 2015.
-
- “20 Warga Ajukan Pelepasan Tanah” dalam *Jawa Pos*, 31 Oktober 2015.
-
- “Siapkan Perubahan Regulasi Surat Ijo” dalam *Jawa Pos*, 20 Februari 2015.
-
- “Surat Ijo Bisa Dapat Ganti Rugi, Perda IPT Siap Direvisi” dalam *Jawa Pos*, 2 Januari 2015
-
- “Surat Ijo Dihargai Separo NJOP” dalam *Jawa Pos*, 24 Februari 2015
- Kompas Warga Surabaya, di atas Ketimpangan Terendah” dalam *Kompas*, 9 September 1986.
- Koran Sindo “Penghuni Surat Ijo Terus Melawan” dalam *Koran Sindo* 21-12-2012
-
- “Penghuni Surat Ijo Terus Melawan” dalam *Koran Sindo*, 21 Februari 2012
- Liberty “Membangun Kota Surabaya” dalam *Liberty*, 30 April 1966
- Pembela Rakyat “Tanah Partikelir” dalam *Pembela Rakyat* No. 31 Tahun ke-1, Desember 1939.
-
- “Perkara Tanah Particulier” dalam *Pembela Rakyat* No 45 Tahun ke-1, 17 Maret 1940.
-
- “Soal Tanah Partikelir” dalam *Pembela Rakyat* No 46 Tahun ke-1, 24 Maret 1940.
-
- “Soal Tanah Partikelir” dalam *Pembela Rakyat* No 47/48 Tahun ke-1, 10 April 1940.



- Pembela Rakjat “Soal Tanah Partikelier” dalam *Pembela Rakjat* No. 49/50 Tahun Ke-1, 30 April 1940.
- Perdamaian “Makam-makam Tionghoa Djadi Korban Bangunan Liar” dalam *Perdamaian*, 12 Agustus 1959.
- Republika “Yusril Sebut Gubernur Jateng Salah Persepsi” dalam *Republika*, 15 Januari 2015
- Suara
Pembaharuan “Indikator Kesalahan Kepala BPN Surabaya Menguat” dalam *Suara Pembaharuan*, 6 Agustus 2015.
- Surabaya Post “Djangan ragu-ragu ganti nama, Pendirian LPKB tentang penggantian nama jang masih Tjina” dalam *Surabaya Post*, 30 Oktober 1966.
- _____ “Komando Penampungan Tuna Karja Djatim Tampung 200 dari S’baja” dalam *Surabaya Post*, 21 April 1966.
- _____ “Kompleks Perumahan Indah Berhasil Dibangun di Sukodami/Djl. Menur Oleh Pelaksana *Pembangunan Putjang 31* Dipimpin Karsito” dalam *Surabaya Post*, 18 Oktober 1966.
- _____ “Menurut LPKB Djatim: Orang Tjina di Indonesia setiap tahun tambah dengan 120.000 orang, Andjuran bentuk panitia pemulangan orang-orang Tjina di daerah-daerah” dalam *Surabaya Post*, 12 Oktober 1966.
- _____ “Pemilik atau Pemakai Tanah akan dikenakan Iuran, Menurut Penggunaannya dan Kelasnya” dalam *Surabaya Post*, 7 April 1966.
- _____ “Pemilik atau Pemakai Tanah akan Dikenakan Iuran, Menurut Penggunaannya dan Kelasnya” dalam *Surabaya Post*, 27 April 1966
- _____ “Pemilik dan Pemakai Tanah Wadjib Membayar Iuran” dalam *Surabaya Post*, 27 April 1966
- _____ “Penempatan/penggunaan Gedung/Sekolah Asing dalam Kota Surabaya” dalam *Surabaya Post*, 11 Oktober 1966.
- _____ “Penetapan Pepelrada tentang Penguasaan dan Penggunaan Inventaris dan Gedung-Gedung Sekolah Asing” dalam *Surabaya Post*, 7 Djuni 1966.

- Surabaya Post “Penetapan Pepelrada tentang: Penguasaan dan Penggunaan Inventaris dan Gedung-gedung Sekolah-sekolah Asing” dalam *Surabaya Post*, 7 Juni 1966
-
- “Penyerahannya kepada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dengan Ketetapan Pepelrada Jatim No. 56/10/1966 tanggal 6 Oktober 1966, dalam *Surabaya Post*, 11 Oktober 1966.
-
- “Pepelrada Djawa Timur Membentuk Komando Penampungan Tuna Karja” dalam *Surabaya Post*, 28 April 1966.
-
- “Harga emas kala itu berkisar antara Rp. 420,- s.d. Rp. 430,- per gram. Harga beras kala itu berkisar antara Rp. 4,- s.d. Rp. 6,- per kg. Lihat *Surabaya Post*, 7 April 1966
-
- “Djangan ragu-ragu ganti nama, Pendirian LPKB tentang penggantian nama jang masih nama Tjina” dalam *Surabaya Post*, 30 Oktober 1968.
-
- “5000 Unit Rumah Perumnas dibagi, 240 rumah diselesaikan” dalam *Surabaya Post*, 2 November 1979.
-
- “Jalan Rungkut Industri Raya Diresmikan” dalam *Surabaya Post*, 29 Desember 1979
-
- “Lewat 29 Oktober, Bangunannya akan Dibongkar KMS” dalam *Surabaya Post*, 24 Oktober 1979.
-
- “Menmud Cosmas Tinjau Proyek Perumnas Tandes” dalam *Surabaya Post*, 16 Oktober 1979.
-
- Juga lihat “Rumah-rumah Perumnas di Balongsari Tandes Diresmikan” dalam *Surabaya Post*, 10 November 1979.
-
- “Rumah Susun Terpaksa Bersaing dengan Real Estate” dalam *Surabaya Post*, 17 April 1985.
-
- “Puluhan hektar Tambak Jadi Perumahan” dalam *Surabaya Post*, 19 September 1986.
-
- “Tak Dibenarkan Perumahan di Areal Tambak” dalam *Surabaya Post*, 10 September 1986.

- Surabaya Post “Perumnas Kembangkan 200 Ha di Benowo” dalam
Surabaya Post, 27 Januari 1987.
- _____ “Lirikan Real Estate Mengubah Daerah ‘Asing’ Menjadi
Kota Baru” dalam *Surabaya Post*, 29 Desember 1988.
- _____ “Dibangun, 18 Ribu RSS/RS di Driyorejo dan Menganti”
dalam *Surabaya Post*, 4 September 1994.
- _____ “Mencermati Peran RSS Driyorejo, Membendung Arus
Urban ke Metropolitan” dalam *Surabaya Post*, 6
September 1994.
- _____ “Rencana Lahan Kota Satelit Ditawar Rp 10.000,00/m²”
dalam *Surabaya Post*, 5 September 1994.
- _____ “Warga Minta Kepastian, Walikota Ngambek”, dalam
Surabaya Post, 8 November 2012.
- Surya “Perlawanan Surat Ijo Semakin Memanas” dalam harian
Surya 26 Februari 2007.
- _____ “Tanah Surat Ijo Bisa Jadi Hak Milik” dalam *Surya*, 11
Februari 2012
- _____ “Bea Pengganti 100 Persen NJOP, Perda Pelepasan
Disetujui Gubernur” dalam *Surya*, 7 Januari 2015
- _____ “Apa Kabar Tanah Surat Ijo” *Surya*, 15 Januari 2013
- _____ “Pengumuman Lelang oleh DPBT Kota Surabaya” dalam
Surya, 6 Juni 2014.
- _____ “Pembayaran Surat Ijo Tanpa Batas Waktu” dalam *Surya*,
17 Februari 2015.
- _____ “Tidak Menggembirakan Warga” dalam *Surya*, 7 Januari
2015.
- _____ “Warga Surabaya pemegang surat Ijo menyatakan siap
memenangkan pasangan Rasiyo - Lucy Kurniasari”
dalam *Surya*, 29 September 2015.

C. Web/Blog Internet

- antarajatim.com “Warga Surabaya Keberatan Pelepasan Lahan Surat Hijau” dalam *Antara Jatim.com*, 20 Januari 2016 di situs
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/171321/warga-surabaya-keberatan-pelepasan-lahan-surat-hijau>
- Bhirawa online “Warga Kota Surabaya Enggan Membeli Tanah Surat Ijo” dalam *Bhirawa online* Diunggah pada 12 Oktober 2016. Dalam situs
<http://harianbhirawa.co.id/2016/10/warga-kota-surabaya-enggan-beli-surat-ijo/>. Diakses pada 2 April 2017.
- beritajatim.com “Mengapa Warga Surat Ijo Yakin Menang di MA?” di media online *beritajatim.com*, 9 Juni 2015 dalam
http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/240241/mengapa_warga_surat_ijo_yakin_menang_di_mk_.html
- Boedi Djatmiko “Tinjauan Persoalan Hukum Pemilikan Tanah (Bekas) Eigendom” Yogyakarta, 25 April 2009 dalam situs
<http://sertifikattanah.blogspot.co.id/2009/04/tinjauan-persoalan-hukum-pemilikan.html>. Diakses pada 6 Juni 2014.
- Bpn.go.id “Penanganan Kasus Pertanahan” dalam web BPN-RI yaitu <http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan>
-
- “Jenis-jenis Konflik Pertanahan” dalam *BPN.go.id*. Ada 10 jenis permasalahan pertanahan. Diakses pada 25 Januari 2013
- Budi Tarigan “Status Hukum Tanah-Tanah Bekas Hak Barat” Menado Post, 11 April 2008 dalam situs <http://opini-manadopost.blogspot.co.id/2008/04/status-hukum-tanah-tanah-bekas-hak.html>. Diakses 14 Mei 2014.
- CentroOne “Warga Tagih Dewan dan Walikota Soal Surat Ijo” dalam *CentroOne*, 7 November 2012.
- Detik News “Puluhan Lansia Tuntut Walikota Hapus Tanah Surat Ijo” dalam *Detik News*, 29 Mei 2012.

- ensiklo.com Muhammad Rifai, “Biografi dan Pemikiran Robert Erza Park” dalam <http://ensiklo.com/2014/09/biografi-dan-pemikiran-robert-erza-park/> Diakses pada 28 Oktober 2015.
- home.sol.no Hans O. Melberg. (1993), *Three Argument about Rational Choice Theory in Sociology*, <http://home.sol.no/hansom/papers/930520.htm>
- hukumonline.com “Arbitrase sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Angkatan Keempat) Memahami Ketentuan Hukum dan Prosedur Beracara Arbitrase” dalam <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat> Diakses pada Kamis, 22 Januari 2015.
-
- “Ahli: Tanah HPL Bukan Aset Daerah” dalam *Hukumonline.com* tanggal 18 Juni 2015, di situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558289b221708/ahli--tanah-hpl-bukan-aset-daerah>
- indosiar.com “Walikota Surabaya Diprotes Warga Pemilik Surat Tanah Hijau” *Indosiar.com* dalam http://www.indosiar.com/fokus/walikota-surabaya-diprotes-warga-pemilik-surat-tanah-hijau_27050.html. diakses tanggal 5 Juni 2012
- jpnn.com “Menteri Fery Desak Wali Kota Surabaya Sertifikatkan Surat Ijo” dalam <http://www.jpnn.com/read/2014/11/19/270735/Menteri-Fery-Desak-Wali-Kota-Surabaya-Sertifikatkan-Surat-Ijo-> tanggal 19 November 2014.
- kabarbisnis.com “Warga Surat Ijo Dukung Golkar” dalam situs *Kabarbisnis*, 29 Maret 2009, dalam situs <http://www.kabarbisnis.com/read/281549/-warga--surat-ijo-surabaya-dukung-golkar>.
- kbbi.co.id Purwodarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam <http://kbbi.co.id/arti-kata/aset>.



- “Puluhan Ribu Warga Surabaya Mendesak Sertifikasi Tanah” dalam *Liputan6.com* SCTV 10 Agustus 2003
- NETSCAPE Max Weber, *Basic Social Concepts of Sociology*, dalam file:///C:/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPT.html. Diakses tanggal 9 Desember 1996.
-
- Max Weber, *Basic Concepts of Sociology*. Dikutip dari file internet: ///C!/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPTS.html.
- Presidenri.go.id “Reforma Agraria adalah Soal Keadilan” dalam <http://www.presidenri.go.id/kabar-terkini/reforma-agraria-adalah-soal-keadilan.html>. Tanggal 26 Maret 2017. Diakses pada 3 April 2017.
- purnawan_basundoro@unair.ac.id. “Sejarah Kaum Miskin Perkotaan”. Dalam Blog www.purnawan_basundoro@unair.ac.id.
- Realita.com* Lihat “Lagi, □□□□□□□□□□□□□□□□ Dituding Penipu” dalam *Realita.com*, 10 Desember 2014, dalam situs <http://www.realita.co/index.php?news=Lagi,-Priyo-Budi-Santoso-Dituding-Penipu~3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296217ed921bfe00477626cd6529bd704590>
- rmol.co “Kepala BPN Surabaya I Nodai Reformasi Agraria” dalam RMOL.Co tanggal 29 Juli 2015 dalam <http://www.rmol.co/read/2015/07/29/211526/Kepala-BPN-Kota-Surabaya-I-Nodai-Reformasi-Agraria->
- SBO TV “Mengurai Benang Kusut Tanah Surat Ijo” dalam siaran televisi SBO TV Surabaya tanggal 14 Maret 2014.
- slideshare.net Nursyahbani Katjasungkana “Petani Indonesia” Makalah *Seminar Kebijakan Agraria di Indonesia* dalam <http://www.slideshare.net/lodzi.....dst>.
- suarapubliknews.net “Adies Kadir Libas Priyo Budi Santoso di Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo” dalam *Suarapubliknews.net* di situs <http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/1827-adies-kadir-libas-priyo-budi-santoso-di-dapil-1-surabaya-sidoarjo>. Tanggal 26 April 2014

- Surabaya.go.id.* APBD Tahun 2010 dalam *[http//www.Surabaya.go.id](http://www.Surabaya.go.id)*.
- surabayakita.com* “Jumlah Pasar Tak Sesuai, PD Pasar Ajukan Revisi Perda” dalam *Surabayakita.com* 30 Juli 2013 di http://surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6753:jumlah-pasar-tak-sesuai-pd-pasar-ajukan-revisi-perda&catid=59:ekonomi-bisnis&Itemid=201
- surabayapagi.com* “Satu Kata, Lawan Pemkot, Deklarasi Tolak Retribusi” dalam *Surabaya Pagi* tanggal 29 Oktober 2009 di <http://surabayapagi.com/index.php?read=Satu-Kata,-Lawan-Pemkot!;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296240e6deb85987fb6bc74ba33edf3189d3>
- tribunnews.com* “Warga Tanah Surat Ijo Mengaku Keberatan Membayar Kompensasi Sesuai NJOP” dalam *Surya Online*, 20 Januari 2016. Lihat di situs <http://surabaya.tribunnews.com/2016/01/20/warga-tanah-surat-ijo-mengaku-keberatan-membayar-kompensasi-sesuai-njop?page=2>
-
- “Warga Surat Ijo siap menangkan Rasiyo” dalam *Tribun News* tanggal 29 September 2015 di situs <http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/29/warga-surat-ijo-siap-menangkan-rasiyo>
-
- “Priyo Budi Santoso, Capres yang Gagal Melenggang ke Senayan” dalam *Tribunnews.com* di situs <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/23/priyo-budi-santoso-capres-yang-gagal-melenggang-ke-senayan?page=2> Tanggal 23 April 2014
-
- “Gubernur Setujui Perda Pelepasan Tanah Surat Ijo, Berlakunya Tunggu Perwali” dalam <http://surabaya.tribunnews.com/2015/01/06/gubernur-setujui-perda-pelepasan-tanah-surat-ijo-berlakunya-tunggu-perwali>. Diakses pada 22 Maret 2015.

D. Buku, Disertasi, Artikel, dan Makalah

- Abdulgani, Roeslan. *Api Revolusi di Surabaya*. Surabaya: Ksatria, 1964.
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Penerbit Alumni, 1984.
- Adi, Dhahana. *Surabaya Punya Cerita*. Vol. 1. Surabaya: India Book Corner, 2014.
- Achdian, Andi. *Tanah Bagi yang Tak Bertanah, Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press, 2009.
- Agam, Yousri Nur Raja, dkk. *Cak Narto Komandan Para Walikota*. Surabaya: Yayasan Peduli Surabaya, 2001.
- Akhudiat. *Masuk Kampung Keluar Kampung, Surabaya Kilas Balik*. Surabaya: Henk Publika, 2008.
- Anastasia, Njo. “Penilaian atas Agunan Kredit Berstatus Surat Hijau” dalam *Journal of Management and Entrepreneurship* Vol. 8, No. 2/2006. Surabaya: Faculty of Economy, Department of Management, Petra Christian University, 2006.
- Ancok, Jamaluddin, “Interaksi Penduduk, Llingkungan, dan Pembangunan” dalam Agus Dwiyanto, dkk., ed., *Penduduk dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1996.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah. *Laporan-laporan tentang Gerakan Protes di Jawa pad Abad XX*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1981.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2006.
- Barber, Sarah dan Corina M. Paniston-Bird (ed.), *Routledge Guides to Using Historical Sources, Historical Beyond the Text, A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources*. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2009.
- Basundoro, Purnawan, *Dua Kota Tiga Zaman, Surabaya dan Malang, Sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak, 2009.

- _____. "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya 1900-1960-an" *Disertasi* pada Program Studi Ilmu-ilmu Humaniora Program Pasca Sarjana FIB UGM, 2011.
- _____. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah FIB Unair dan Elmatera, 2012.
- _____. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Berger, Arthur Asa, *Pengantar Semiotika, Tanda-tanda dalam kebudayaan*. Terjemahan Dwi Marianto. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2010.
- Bernstein, Henry, dkk., 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: STPN, 2008.
- Blau, Peter. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley, 1964.
- Boeke, J.H. dan D.H. Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger*. Pengantar oleh Soekadji Ranuwihardjo. Jakarta: Bhratara, 1973.
- Borras Jr., Saturnino. "The Underlying Assumptions, Theory, and Practice of Neoliberal Policies (1009)" dalam R. Patel dan M. Corville (eds)., *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books, 2006.
- Broeshart, A.C., dkk. *Soerabaja, Beld van een Stad*. Nederland: Asia Maior, 1985.
- Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Djilid Kedua. Disadur dan dikarang kembali oleh Prajudi Atmosudirdjo. Djakarta: Pradnya Paramita, 1970.
- Cassell, Philip (ed.), *The Giddens Reader*. California: Stanford University Press, 1993.
- Chayanov, A.V. *The Theory of Peasant Economy*. Ed. by D. Thorner, dkk. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1966.
- Chomzah, H. Ali Achmad. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.
- Christodoulou, Demetrios. *The Unpromised Land, Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London and New Jersey: Zed Books, 1990.
- Collins, Randall, *Conflict Sociology*. New York: Academic Press, 1974.



Colombijn, Freek. *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during the Decolonization of Indonesia, 1930–1960*. Leiden: KITLV Press, 2010.

_____. “Public Housing in post-colonial Indonesia: The Revolution of Rising Expectations” in *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania; BKI) 167–4 (2011): 437–458. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2011.

Daftar Inventarisasi Tanah yang Dikelola oleh Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya: DPBT Kota Surabaya, 1996.

Daftar Inventarisasi Tanah yang Dikelola oleh Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya: DPBT Kota Surabaya, 1999.

Daftar Inventarisasi Tanah yang Dikelola oleh Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya: DPBT Kota Surabaya, 2008.

Dick, Howard W., *Surabaya City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000*. Athens: Ohio University Press, 2003.

_____. “Industrialisasi Abad ke-19: Sebuah Kesempatan yang Hilang” dalam Thomas Linbald (ed.) *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Diesel, H. van. “Rapport Omtrent De Particuliere Landerijen, Beoosten de Rivier Tjimanoeek”. dalam *Tijdschrift voor de Nederlands-Indie Maatschapij van Nijverheid en Landbouw*. 1878, 22: 237-238.

Diessen, Drs. J.R. van dan Zierikzee (ed.). *Asia Maior. Soerabaja 1900-1950, Havens, Marine, Stadsbeld Port, Navy, Townscape*. Meppen ZL: Uitgeverij Asia Maior, 2004.

Djuita, Ratna dan Indriyati, “Eksistensi dan Konflik Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat”, dalam *Jurnal Pertanahan, Menggagas RUU Pertanahan*, Vol. 1 No. 1 November 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, 2011.

Drakakish-Smith, David. *Urbanization, Housing and the Development Process*. London: Redwood Burn Linmited, 1981.



Effendie, Bachtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993.

Erwiningsih, Winahyu. *Hak Menguasai Negara atas Tanah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII dan Total Media, 2009.

Ever, Hans-Dieter. *Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Faber, G.H. von. *Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie Eerste Koopstaad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad 1906*. Soerabaia: De Gemeente Soerabaia, 1931.

_____. *Nieuwe Soerabaia: Des Geschiedenis van Indie's voornaamste Koopstad in de Eerste Kwartee Sedert Hare Instelling 1906-1931*. Surabaya: N.V. Boekhandel en Drukkerij, 1934.

_____. *Er Stad Geboren: de Wording-gescheidenis van Het Oudste Soerabaia*. Soerabaja: N.V. Koninklijke Boekhandel en Drukkerij G. Kolf & Co., 1953.

Fauzi, Noer, "Gelombang Arus Raforma Agraria di Awal Abad 21" Makalah dalam seminar: *Agenda Pembaruan Agraria dan Tirani Modal*. Jakarta: FISIP UI, 2008.

_____. *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta: Insist Press, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Lingkar untuk Pembangunan Desa dan Agraria (KARSA), 2003.

_____. *Land Reform: Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: STPN dan Sains, 2012.

Feith, Herbert dan Lance Castles (ed.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. New York : Cornell University Press, 1970.

Fielding, Nigel G. (ed.), *Actions and Structure, Research Methods and Social Theory*. London, Newbury Park, Beverly Hills, New Delhi: Sage Publication, 1988.

Frederick, William H., *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Fuchter, W.A.H. *Verslag van den Toestand der Stadsgemeente Soerabaja Over 1940, Deel 1, Algemeen Verslag*, Soerabaja, 1 Juni 1941.

- Galtung, Johan, *Kekerasan Kultural, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Garna, Judistira K., *Teori-teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1992
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Gautama, Sudargo dan Ellyda T. Soetiyarso. *Komentar atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan UUPA (1960)*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press, 1984.
- G. Kartasapoetra, dkk. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Graaf, H.J. De. *Surabaya dalam Abad ke XVII: Dari Kerajaan sampai Kabupaten (Soerabaja in de XVII Eeuw van Kononklijk tot Regentschap)*. Terjemahan Soewandi. Yogyakarta: Balai Penelitian Sejarah dan Budaya, 1981.
- Gramsci, Antonio. *Sejarah dan Budaya* (Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000
- Habermas, Jurgen. *Legitimation Crisis*. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press, 1975.
- Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Yogyakarta: Andi, 1996.
- Hardjosoedarmo, Soedigdo. *Masalah Tanah di Indonesia (Suatu Studi sekitar Pelaksanaan Landreform di Djawa dan Madura)*. Djakarta: Bhratara, 1970.
- Harsono, Boedi. *Undang-Undang Pokok Agraria, Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksanaannya*, Djakarta: Djambatan, 1968.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 1982.

- _____. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.
- Heemstra, J., "Particuliere Landerijen in en Om Soerabaia" dalam *Koloniaal Tijdschrift*, 29 E Jaargang.
- Hobsbawm, Eric. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991*. London: Abacus Books, 1995.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.
- Huizer, Gerrit, *Peasant Rebellions in Latin America*. Harmondsworth: Penguin, 1973.
- _____, *Peasant Mobilization and Land Reform in Indonesia*. The Hague: Institute of Social Studies, 1972.
- Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingan dengan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Indrijanto, "Menjadi Pusat Pelayaran dan Perdagangan Interregional: Pelabuhan Surabaya 1900-1940" *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada*, 2015.
- Ismail, Nurhasan. "Arah Hukum Politik Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat" dalam *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1 No. 1 April 2012.
- Johara T. Jayadinata. *Tataguna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB, 1992.
- Jones, Sidney. "Indigenous Rights vs Agrarian Reform in Indonesia: A Case Study From Jambi". 15 April 2014 *IPAC Report* No. 9. Dalam https://www.academia.edu/6801943/INDIGENOUS_RIGHTS_VS_AGRARIAN_REFORM_IN_INDONESIA
- Kartodirdjo, Sartono, *Protest Movement in Rural Java, A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*. Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta, London, New York, Melbourne: Oxford University Press dan P.T. Indira, 1973.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid 5 Jakarta: Depdikbud, 1975.

Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

_____. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

_____. *Pemberontakan Petani Banten 1888* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

_____. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium ke Imperium*. Jilid 1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

_____. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Indonesia, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Kata Pengantar Prof. Bambang Purwanto. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Kasdi, Aminuddin, dkk. *Surabaya dan Jejak Kepahlawanannya*. Surabaya: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, 2008.

Katjasungkana, Nursyahbani "Petani Indonesia" Makalah *Seminar Kebijakan Agraria di Indonesia* dalam <http://www.slideshare.net/lodzi.....dst>.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) tentang Pertanahan.

Khusyairi, Johnny A. and La Ode Rabani (ed.) (2011) *Kampung Perkotaan Indonesia: Kajian Historis Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*. Yogyakarta: ANRC, Departmen Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga dan New Elmatara.

Koesmen, Sjamsu dan Pangestu B.W., *Petundjuk Kota Besar Surabaya*. Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

_____. *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Linbald, Thomas (ed.) *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 1998.

Limbong, Bernard, *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012;



Lipton, Michael. "Toward A Theory of Land Reform", dalam *Agrarian Reform and Agrarian Reformist: Studies in Peru, Chile, China, and India*. Edited by D. Lehmann. London: Faber, 1974.

_____, *Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs*. London and New York: Routledge, 2010.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia, 2000.

_____. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 2000.

_____. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (ed.). *Berebut Tanah, Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Isist Press, 2002.

Lucas, Anton dan Carol Warren, editors. *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio: Ohio University Press, 2013.

Luthfi, Ahmad Nashih, dkk. (ed). *Kronik Agraria Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor, dan Aktor*. Yogyakarta: STPN dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2010.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill Co., 1992.

Marzuki, Suparman "Konflik Tanah di Indonesia" Makalah dalam *Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah*, Lombok, 21-23 Oktober 2008.

McAndrews, Collin. *Land Policy in Modern Indonesia: A Study of Land Issues in the New Order Period*, Boston: Oelgeschlager, Gunn and Hain, and Lincoln Institute of Land Policy, 1986.

McAuslan, Patrick. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Jakarta: Gramedia, 1986;

McCarthy, John. F. dan Kathryn May Robinson, *Law and Developing in Indonesia: Searching for the People Sovereignty*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, Markono Print Media Pte Ltd 2016.

Melberg, Hans O. *Three Argument about Rational Choice Theory in Sociology*, <http://home.sol.no/hansom/papers/930520.htm>., 1993.

- Moeiman, Susi dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan KITKLV, 2005.
- Mubyarto, dkk., *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1993.
- Muryadi, "Konflik Tanah Tubanan, Surabaya" *Laporan Penelitian* (Surabaya: LPPM, 2005).
- Nas, Peter J.M. *Kota di Dunia Ketiga, Kota dalam Berbagai Kawasan, Kebudayaan, dan Masa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979.
- Nas, Peter J.M. (ed.) *Kota-kota Indonesia, Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Noor, Aslan. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2006.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.). *Perspektif Baru dalam Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV, Pustaka Larasan, 2008.
- Noordjanah, Andjarwati. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak, 2010.
- Padmo, Soegijanto, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2000.
- Parlindungan, A.P., *Landreform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1991.
- Patel, R dan M. Corville (eds.), *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. Oakland: Food First Books, 2006.
- Patria, Nezar dan Andi Arief, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Pelzer, Karl J., *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Pemerintah Kotamadya Surabaya. *Buku Himpunan Peraturan-peraturan Daerah Kotamadya Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kotamadya Surabaya, 1969.

Peters, Robbie, *Surabaya 1945–2010: Neighbourhood State and Economy in Indonesia's City of Struggle*. ASAA Southeast Asia Publication Series. Singapore: NUS Press, 2013.

PMPMHMT. *Permasalahan Surat Ijo di Kota Surabaya*. Surabaya: PMPMHMT, TT.

Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali dan Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, 1987.

Pranoto, Suhartono W., *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

_____, *Jawa, Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Propinsi Djawa Timur. Surabaya: Djawatan Penerangan Republik Indonesia, 1955.

Purwanto, Bambang, *Kepemimpinan dan Masalah Pertanian di Pedesaan Jawa: Kasus Desa Nampu dan Desa Ngandagan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1985.

Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Purwanto, Bambang, "Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan tentang Sejarah Perkebunan Indonesia", dalam <http://rizalm09.student.ipb.ac.id/2012/04/03/menelusuri-akar-ketimpangan-dan-kesempatan-baru-catatan-tentang-sejarah-perkebunan-indonesia/>. Diunggah pada 3 April 2012, diakses pada 14 Maret 2017.

_____. "Menulis Kehidupan Sehari-hari Jakarta: Memikirkan Kembali Sejarah Sosial Indonesia" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor-KITLV, 2008.

Putri, Amityasari Ika. *Perselisihan Kepentingan antara Komunitas Ijin Pemakaian Tanah dengan Pemerintah Kota Surabaya*. Skripsi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, 2008.



Rachman, Noer Fauzi, *Land Reform dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: STPN dan SAINS, 2012.

Rahayu, Shinta Devi Ika Santhi. *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya*. Surabaya, Yogyakarta: Revka Petra Media, Departemen Ilmu Sejarah FIB Unair, dan Penerbit Lilin, 2012.

Rahmi, Elita. "Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan Realitas Pembangunan Indonesia" dalam Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 3 September 2010. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2010.

Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Third Edition. London: Palgrave Macmillan, 2001.

Rifai, Muhammad, "Biografi dan Pemikiran Robert Erza Park" dalam <http://ensiklo.com/2014/09/biografi-dan-pemikiran-robert-erza-park/>. Diakses pada 28 Oktober 2015.

Roll, Werner. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, Studi Kasus Daerah Surakarta Jawa Tengah*. Penerjemah: Nyonya Jane Tjan. Jakarta: Rajawali, 1983.

Samidi. "Masyarakat Kota dan Hiburan Teater Tradisional di Surabaya, 1950-1958". *Tesis* pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2008.

Santoso, Urip. "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional" dalam Jurnal *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2012.

_____. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Sarkawi, *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan*. Surabaya: LIPI Press, 2010.

_____. "Mengubah dan Merusak Lingkungan Mengundang Air Bah; Banjir di Kota Surabaya pada Paruh Kedua Abad XX" *Disertasi* di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2016.

Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES, 198.

Sekarnadji, Agus. dkk. *Laporan Penelitian: Perlindungan Hukum bagi Pemegang Surat Hijau di Kota Surabaya*. (Surabaya, LPPM Unair), 2005.

Sekretariat Perhimpunan Pemegang Surat Hijau. *Pemegang Surat Ijo telah Menjadi Korban Pembodohan, Penindasan dan Pemerasan Pemerintah Kota Surabaya (Suatu Kajian Hukum Agraria)*. Surabaya: Perhimpunan Masyarakat Peserta Meraih Hak Milik Tanah Rakyat Surabaya Pemegang Surat Ijo, 2004.

Setiawati, Nur Aini. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute, 2011.

Sewindu Membangun Surabaya 1979-1987. Surabaya: Bagian Humas KMS, 1988.

Silas, Johan. *Kampung Surabaya Menuju Metropolitan*. Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti dan Surabaya Post, 1996.

_____. "Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX" dalam Freek Columbijn dkk., *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak-NIOD dan Jurusan Sejarah FIB Uninersitas Airlangga, 2005.

Sitorus, Oloan, dan Nomadyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*. Jakarta: Dasamedia Utama, 1994.

Snelleman, John F., *Encyclopaedia Nederlandsch-Indie*. 'sGravenhage: Martinus Nijhoff, 1917.

Soemardijono, *Analisis Mengenai Hak Pengelolaan (HPL)*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pertanahan, 2006.

Soeparta, D., *Kenang-kenangan 5 Tahun Kota Besar Surabaya 1950-1956*. Surabaya: Panitya Buku Kenang-kenangan Kota Besar Surabaya, 1956.

Soetojo, M., *Undang-undang Pokok Agraria dan Pelaksanaan Land Reform* (Jakarta: Staf Penguasa Perang Tertinggi, 1961)

Spencer, Herbert. *Principles of Sociology* dalam file:///CI/INTERNET/NETSCAPE/SPENCER.H. Yang dikutip dari Robert Bierstedt, *The Making of Society*. New York: Modern Library, 1959, pp. 253-273.

Staatblad No. 422 Tahun 1912, *Peratoeran Baroe atas Tanah Particulier di Tanah Djawa Seblah Koelon* (Batavia: Landsdrukkerij, 1913).



Steele, R.M. *Origins and Occupational Mobility of Livetime Migrants to Surabaya East Java*. Vol. 1. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University, December 1980.

Sub Bagian Humas dan Protokoler Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 1980.

Sukadana, Adi. “Perubahan Ekologi di Daerah Hilir K. Solo dan K. Brantas” *Makalah* yang disampaikan pada Ceramah Ilmiah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pada 2 Maret 1979.

Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Edisi Revisi Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

_____. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.

Surbakti, Ramlan. “Perebutan Ruang di Perkotaan dan Pembenaannya” dalam *Prisma* No. 9 Tahun 1996.

Suryo, Djoko, “Masyarakat Indonesia dalam Dinamika Sejarah: Kesenambungan dan Perubahan”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar* pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 20 Agustus 1998.

Tauchid, Mochammad. *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jilid I dan II. Djakarta: Penerbit Tjakrawala, 1952.

Tjandra, W. Iriawan dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).

Tjiptoatmodjo, F.A. Soetjipto, Kota-kota di Pantai Utara Jawa. *Disertasi*. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1983.

Thalib, Sujuti, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Jakarta: Bina Aksara, 1085.

Tillema, H.F., *Kromoblanda: Over't vraagstuk van “het Wonen” in Kromo's grote land*. Jilid I a.d. V. s'Gravenhage: Uden Masman, de Atlas en Adi Poestoekeo, 1923.



Tim Penulis dan Peneliti SP4 Jurusan Sejarah. *Jawa Abad XX, Perkebunan dan Dinamika Pedesaan*. Yogyakarta: Penerbit Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2005.

Tjandra, W. Iriawan dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

Tjondronegoro, Sediono M.P., *Sosiologi Agraria, Kumpulan Tulisan Terpilih*. Suntingan: M.T. Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi. Bogor: Yayasan Akatiga, 1999.

Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT. Gramedia, 1984.

Weber, Max, *Basic Concepts of Sociology*. Dikutip dari file internet: [///C:/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPTS.html](http://C:/INTERNET/NETSCAPE/BASIC_CONCEPTS.html).

Wertheim, W.F. *Indonesia Society in Transition, A Study of Social Change*. 2nd. Edition. Bandung: Sumur Bandung dan N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve, 1956.

White, Ben, Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Ian Scoones and Wendy Wolford. (2012) 'The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals'. *Journal of Peasant Studies* 39 (3-4): 619-647;

Widodo, Dukut Imam, *Soerabaia Tempo Doeloe*. Jilid I dan II. Surabaya: Dinas Pariwisata Kota Surabaya, 2002.

Wijito, Listiarko, Widyaiswara Muda Pusdiklat KNPk, "Filosofi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan" dalam situs <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/10010-filosofi-pemungutan-pajak-bumi-dan-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan>. Diunggah 28 Desember 2012. Diakses pada 2 April 2017.

Wiradi, Gunawan. *Metodologi Studi Agraria*. Suntingan: Moch. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, 2009.

_____, *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Revisi. Bogor: Sajogyo Institute, Insist Press, KPA, Pustaka Pelajar, 2009.

_____. Wiradi, Gunawan, *Reforma Agraria untuk Pemula*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2005.

Wirayuda, Arya W. *Dari Klaim Sepihak hingga Land Reform, Konflik Penguasaan Tanah di Surabaya 1959-1967*. Yogyakarta: STPN Pers, 2011.

Wolf, Eric. *Peasant Wars of The Twentieth Century*. New York: Harper and Row, 1969.

Wolff, Kurt. Trans. *The Sociology of George Simmel*. New York: Free Press, 1950. pp. 402-408. Dalam file:///CI/INTERNET/NETSCAPE/STRANGER.

E. Daftar Peraturan Perundangan yang Terkait

1. Peraturan Tingkat Daerah

- 1954 Rantjangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Penjawaan Tanah Kota Besar Surabaya. Surabaya, 1 November 1954. Tidak/belum disahkan.
- 1955 Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 41 Tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak yang disebut Hak Idjin, Hak Perkenan, dan Hak Perlulusan. Surabaya, 10 Agustus 1955.
- 1955 Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 53 Tahun 1955 tentang Pemberian Hak Erfpacht Kota Besar Surabaya.
- 1955 Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum. Surabaya, 10 Agustus 1955.
- 1970 Putusan DPR-GR Kotamadya Surabaya No. 09/DPRD-GR/Kep./1970 tentang Rencana Pendahuluan Kotamadya Surabaya (*Out Line*). Surabaya, 23 Nopember 1970.
- 1970 Putusan DPR-GR Kotamadya Surabaya No. 11/DPRD-GR/Kep./1970 tentang Rencana Terperinci (*Detail Plan*) Daerah Perumahan Dukuh Kupang, Garis Sempadan Jl. Dharmawangsa dan Jl. Kertadjaya. Surabaya, 25 Nopember 1970.
- 1971 Keputusan DPRD Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 03E/DPRD-GR KEP/1971 tertanggal 6 Mei 1971 tentang *Sewa Tanah*.
- 1975 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 6 Tahun 1975 tentang Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Sepanjang Jalan Terobosan Tandes-Greges. Surabaya, 24 Desember 1975.
- 1977 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1977 tentang Pemakaian dan Retribusi Tanah yang Dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- 1978 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Kota Surabaya 2000. Surabaya, 3 Agustus 1978.
- 1982 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Dharmawangsa. Surabaya, 27 Mei 1982.
- 1982 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Kompleks Pucang Taman. Surabaya, 27 Mei 1982.
- 1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Wonokromo dan Sekitarnya. Surabaya, 24 Februari 1983.
- 1983 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penetapan Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah Jalan Pucang Anom. Surabaya, 24 Februari 1983.
- 1987 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 3 Tahun 1987 tentang Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya, 20 Mei 1987
- 1994 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 12 Tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya, 28 Oktober 1994.
- 1997 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 23 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya, 12 Maret 1997.
- 1997 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah. Surabaya, 31 Januari 1997.
- 1998 Keputusan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1998 tentang *Tatacara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah*. Surabaya, 09 Januari 1998.
- 1999 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 16 Tahun 1999 tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah*. Surabaya, 27 Juli 1999.
- 2002 Keputusan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pemutihan IPT.
- 2002 Keputusan Walikota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/214A/.4902.1.2/2002 tentang Pemutihan IPT.
- 2003 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 21 Tahun

- 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Surabaya, 5 Nopember 2003.
- 2005 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Surabaya, 24 Agustus 2005.
- 2009 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya. Surabaya, 20 Maret 2009.
- 2010 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Surabaya, 29 November 2010.
- 2010 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Surabaya, 1 Desember 2010.
- 2010 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/128/436.1.2/2010 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kota Surabaya. Surabaya, 1 Januari 2010.
- 2011 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Wilayah Kerja Kecamatan Gubeng, Tambaksari, Bulak, dan Kenjeran pada Unuit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3. Surabaya, 27 Januari 2011.
- 2012 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Surabaya 4 Juni 2012.
- 2013 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Surabaya, 26 Pebruari 2013.
- 2013 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana. Surabaya, 24 Desember 2013.
- 2014 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Surabaya, 15 Agustus 2014. Diundangkan pada 28 Januari 2015.
- 2015 Peraturan Walikota Surabaya No. 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya, 25 September 2015.
- 2016 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Surabaya, 23 Februari 2016.

2. Peraturan Perundangan Tingkat Nasional

- 1950 Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Jogjakarta, 14 Agustus 1950.
- 1952 Undang-undang Nr 6 Tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-undang No. 6 Tahun 1951 untuk Mengubah “*Grondhuur Ordonnantie*” (Stbl 1918 Nr 88) dan “*Verstenlandsch Grondhuurreglement*” (Stbl 1918 Nr 20)” sebagai Undang-undang. Djakarta, 23 Juli 1952.
- 1953 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Djakarta, 24 Januari 1953.
- 1954 Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1952) sebagai Undang-undang. Djakarta, 13 Juli 1954.
- 1957 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Djakarta, 25 Mei 1957.
- 1958 Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir
- 1960 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA 1960.
- 1960 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969
- 1960 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 1960 Keputusan Menteri Agraria No. SK 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian.
- 1961 Keputusan Presiden RI No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penjelenggaraan Landreform.
- 1961 Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan Lain-lainnya yang Aktanya Belum Diganti. Djakarta, 23 September 1961.
- 1961 Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Djakarta, 23 September 1961.
- 1961 Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1961 tentang Permintaan dan

Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah. Jakarta, 23 September 1961.

- 1961 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Djakarta, 23 Maret 1961.
- 1962 Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka Tanggal 20 Januari 1962, tentang Pendaftaran Hak Pakai
- 1963 Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk. 12/Ka/1963 tentang Konversi Hak Opstal dan Erfpacht Diatas Tanah Eigendom Kotapradja. Djakarta, 14 Mei 1963.
- 1963 Surat Keputusan Menteri Agraria No. 12/KaJ1963 tentang Konversi Hak atas Tanah.
- 1965 Keputusan Menteri Agraria Nomor Sk. 88/Depag/1965 tentang tentang Penghentian untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-Anggauta Panitia Landreform Pusat/Daerah yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.). Djakarta, 26 Oktober 1965.
- 1965 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja. Djakarta, 6 Desember 1965. (s.d.u. dengan Permen Agraria No. 1 Tahun 1966 dan Permendagri No. 5 Tahun 1974).
- 1966 Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Djakarta, 5 Djanuari 1966.
- 1971 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1971 tentang Penyelesaian Konversi Hak-hak Barat menjadi Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.
- 1971 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 29 Maret 1971.
- 1972 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Jakarta, 30 Juni 1972.
- 1973 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Jakarta, 26 Juni 1973.
- 1977 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1977 tentang Tatacara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. Jakarta, 17 Februari 1977.



- 1979 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Jakarta, 8 Agustus 1979.
- 1979 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Jakarta, 22 Agustus 1979.
- 1982 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Lakarsantri, Kenjeran, dan Benowo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Jakarta, 20 September 1982.
- 1992 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Situbondo dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Timur. Jakarta, 19 September 1992.
- 1996 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Jakarta, 17 Juni 1996.
- 1997 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana(RSS) dan Rumah Sederhana (RS) jo. Nomor 15 Tahun 1997 dan Nomor 1 Tahun 1998.
- 1997 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jakarta, 8 Juli 1997.
- 1997 Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB). Jakarta, 29 Mei 1997.
- 1998 Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pendataan dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Penanaman Tanaman Pangan. Jakarta, tanpa tanggal.
- 1998 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah. Jakarta, 29 Januari 1998.
- 1998 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal. Jakarta, 26 Juni 1998.
- 1998 Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala BPN No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Jakarta, 22 Juni 1998.

- 1998 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik. Jakarta, 12 Oktober 1998.
- 1998 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan. Jakarta,
- 1999 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- 1999 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Perkaban 9/1999. Jakarta, 24 Oktober 1999.
- 1999 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta, 12 Agustus 1999.
- 1999 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 16 Agustus 1999.
- 2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan. Jakarta, 17 Juli 2001.
- 2001 Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta, 14 Januari 2004.
- 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Jakarta, 30 Desember 2005.
- 2006 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta, 24 April 2006.
- 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta,
- 2008 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006. Jakarta, 19 Mei 2008.
- 2009 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Jakarta, 25 Mei 2009.

- 2009 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Jakarta, 6 Maret 2009.
- 2011 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Jakarta, 4 Pebruari 2011.
- 2011 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Jakarta, 15 November 2011.
- 2013 Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/Ins/II/2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013. Jakarta, 25 Februari 2013.
- 2014 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta, 24 April 20104.
- 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, 30 September 2014.

3. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2009 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 105/G/2008/PTUN.Sby tanggal 27 Juli 2009. Kasasi dimenangkan oleh warga Ngagel Madya Kelurahan Baratajaya.
- 2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 PK/TUN/2012. Tanggal 9 November 2012. PK diterima/dikabulkan melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/TUN/2010, tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Baratajaya.
- 2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 98 PK/TUN/2012. Tanggal 13 November 2012. PK diterima/dikabulkan melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/TUN/2010, tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Ngagel Madya.
- 2012 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 99 PK/TUN/2012. Tanggal 21 Desember 2012. PK diterima/dikabulkan melalui pembatalan putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2010, tanggal 28 September 2010 yang dimenangkan warga Ngagel Madya 2.
- 2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 62/PUU-XIII/2015

tanggal 16 November 2015.

Daftar Informan

No.	Nama	L/P	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Kantor
1.	Agus Sekarnaji, Dr. MH.	L	52	Dosen FH Unair, Penghuni baru tanah surat ijo	Jl. Baratajaya III/98 Surabaya
2.	Agus Swantoro	L	46	Seksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Jl. Puspa Surabaya
3.	Armudji	L	54	Ketua DPRD Kota Surabaya	Jl. Ngagelmulyo IV Surabaya
4.	Atong Leo Widagdo	L	54	Seksi Perubahan Peruntukan Tanah BPN Kota Surabaya	Jl. Puspa Surabaya
5.	Bambang Soedarno	L	75	Purnawirawan AL	Jl. Ikan Gurami Perak Barat Surabaya
6.	Bambang Sudibyo, Drs.	L	76	Pensiunan Dinas Koperasi Jatim (Ketua PMPMHMT/GPHSIS)	Ngageltirto II/8 Sby
7.	Cholifah	P	45	Penghuni tanah surat ijo dan pemilik warung	Jl. Manyar Sambongan Surabaya
8.	Dedy Prasetyo	L	48	Anggota DPRD Kota Surabaya	Jl. Yos Sudarso Surabaya
9.	Djarot W. Muliawan, Dr.	L	54	Ka Balitbang Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur	Kantor Wilayah BPN Prov. Jatim Jl. A Yani Surabaya
10.	Djoko Sumarsono, SH., CN.	L	58	Pengacara	Krukat Utara 8/10 Surabaya
11.	Djumadji, Drs.	L	58	Mantan Kepala DPBT Kota Surabaya	Jalan Jimerto Surabaya



12.	Eddy Samson	L	78	Warga Indo-Belanda dan Budayawan Surabaya	Wisma Asem Mulya IV Surabaya
13.	Edy Suprpto	L	58	Purnawirawan Polri	Ngagel Mulyo V Surabaya
14.	Eko Prianggodo	L	55	Seksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Jl. Puspa Surabaya
15.	Fajar Febriansyah, SH.	L	34	Seksi Pengamanan Aset DPBT Kota Surabaya	Kompleks Kantor Kota Surabaya Jl. Sedap Malam Sby
16.	Gindun Suwono	L	76	Purnawirawan Marinir AL	Jagir Sidomukti IX Surabaya
17.	H. Chodrati Usman, SH.	L	78	Mantan PNS	Jl. Juwangan No. 124 Surabaya
18.	Hardimin	L	73	Purnawirawan AL	Tambak Segaran, Surabaya
19.	Hendrik Susanto	L	45	Wiraswasta (Penghuni Tanah Bersurat Hijau Jagir)	Jagir Sidomukti VI Surabaya
20.	Herawati	P	59	Ibu RT	Jagir Sidomukti IV Surabaya
21.	Herlina Harsono Njoto,	P	40	Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya	Jl. Yos Sudarso Surabaya
22.	Ibu Idris	P	66	Swasta	Jagir Sidomukti Gang Lebar Surabaya
23.	Ibu Wiwik	P	63	Pensiunan PNS	Jl. Ngagelrejo Gang VIII Surabaya
24.	Indriyani	P	65	Wiraswasta	Jl. Buwono 6 Peneleh Surabaya
25.	Joko Purnomo	L	48	Wiraswasta (Penghuni Tanah Bersurat Hijau Jagir)	Jagir Sidomukti VI Surabaya
26.	Joko Riyanto	L	50	Swasta	Jagir Sidomukti IX Surabaya
27.	Kusnan	L	78	Purnawirawan Marinir	Jl. Ngagel Wasono I Surabaya
28.	M.T. Rahayu	P	55	Kepala DPBT	Jalan Jemur Gayungan 107 Surabaya
29.	Mintardji	L	76	Pensiunan PT. Pelni	Jl. Bratanggede VI E/5 RT 02 RW XII Surabaya
30.	Misran	L	48	Swasta	Jagir Sidomukti IX Surabaya
31.	Moch. Alfian	L	55	Seksi Perubahan Peruntukan Tanah BPN Kota Surabaya	Jl. Puspa Surabaya



32.	Moch. Syi'in	L	65	Purnawirawan AL/Marinir	Jagir Sidomukti IX Surabaya
33.	Moh. Asik	L	58	Wiraswasta. Pegiat Gratis Jagir	Jagir Sidomukti VI Surabaya
34.	Moh. Farid	L	69	Mantan Bupati Lamongan	Taman Nginden Intan Surabaya
35.	Moh. Havid	L	67	Pensiunan PNS Bagian Hukum Pemkot Surabaya	Kutisari RT VI RW I, No. 38 Tenggilis Mejoyo
36.	Moh. Jaelani	L	67	Wiraswasta	Jagir Sidomukti VI Surabaya
37.	Mustakin	L	43	Swasta	Jl. Gembili, Bendul Merisi Surabaya
38.	Ngadiono	L	53	Seksi Penguasaan dan Pemilikan Tanah	Jl. Puspa Surabaya
39.	Nuryahman	L	57	Seksi Perubahan Peruntukan Tanah BPN Kota Surabaya	Jl. Puspa Surabaya
40.	Pak Icuk	L	57	Polisi	Karang Empat 35 Surabaya
41.	Poniran	L	38	Wiraswasta (Penghuni Tanah Bersurat Hijau Jagir)	Jagir Sidomukti VI Surabaya
42.	Purnomo, Drs.	L	67	Pensiunan Dinas PU	Jl. Baratajaya IX No. 2 Surabaya
43.	Samijo	L	76	Purnawirawan AL	Jl. Baratajaya IX No. 66 Surabaya
44.	Sasmito	L	75	Purnawirawan AL (Anggota PMPMHT)	Ngageltirto IV/12 Sby
45.	Satrio Wijoyo	L	35	Swasta, Penghuni tanah surat ijo (warisan orang tua)	Baratajaya III/36 Surabaya
46.	Satriya Sembiring	L	55	Swasta	Dukuh Kupang Timur XVIII/47
47.	Simun	L	70	Swasta	Jagir Sidomukti IX Surabaya
48.	Soebandi	L	76	Pensiunan PNS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur	Jl. Kutisari Surabaya
49.	Soedarno	L	67	Purnawirawan AL	Jagir Sidomukti IX Surabaya
50.	Soewarno, Drs.	L	72	Pensiunan PNS Dosen IKIP Surabaya/Unesa	Bratanggede F/15 Surabaya
51.	Subandi	L	70	Swasta	Jl. Tuban, Dupak Surabaya
52.	Sudjiman	L	76	Pensiunan Sipil AL	Jl. Ngagel Madya II/21 Surabaya



53.	Suhardi	L	74	Pensiunan PNS Dikbud	Gubeng Airlangga VII Surabaya
54.	Sunardi	L	67	Pensiunan PNS	Kutisari RT V RW I, No. 4 Tenggilis Mejoyo
55.	Sunari	L	54	Swasta	Dukuh Kupang Timur XVIII/50
56.	Supadi HS.	L	76	Wiraswasta (Bendahara PMPMHMT)	Bratang Gede E/20 Surabaya
57.	Suparmi	P	59	Wiraswasta	Gadukan V/10 Perak Barat Surabaya
58.	Suparni Daryanto	L	70	Pensiunan PNS DPBT Pemkot Surabaya	Kutisari RT V RW I, No. 26 Tenggilis Mejoyo
59.	Suparto Brata	L	84	Pensiunan Pemkot Surabaya, Budayawan	Rungkut Asri Utara Surabaya
60.	Suradi	L	72	Purnawirawan AL	Jl. Ikan Mungsing VII/20 Surabaya
61.	Sutji Rahayu	P	65	Pensiunan PNS	Dukuh Kupang Timur RW VIII
62.	Teguh Jupri	L	77	Wiraswasta	Baratajaya Barat V Surabaya
63.	Tunggul	L	50	Wiraswasta	Baratajaya Barat XVI Surabaya
64.	Urip Santoso, Dr. MH.	L	52	Dosen FH Unair	Kampus B Unair Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya

L A M P I R A N